

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN KAMPAR

Sofiandi<sup>1</sup>, Syapsan<sup>2</sup>, dan Dahlan Tampubolon<sup>3</sup>

*Program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru*

### ABSTRACT

*This study aims to analyze what influences the receipt of building permit fees in Kampar Regency. This study uses secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and the DPTSP of Kampar Regency in 2010 - 2019, while the data analysis technique is to use multiple linear regression methods. The results of the study found that the number of buildings had a significant positive effect on IMB fees in Kampar Regency. Meanwhile, PDRB has no positive effect on receiving IMB fees in Kampar Regency. The implementation of policies carried out in Kampar District to increase the receipt of IMB fees is to increase public awareness in managing IMB permits.*

**Keywords:** *Retribution for IMB, GRDP, Number of Buildings, Policy*

### LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pelaksanaan desentralisasi memberikan peluang pada pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya secara efektif, dengan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan. Untuk itu harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai yang berasal dari PAD. Sebagian besar daerah mengalami masalah keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, karena sumber penerimaan PAD potensinya rendah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah salah satunya adalah retribusi daerah, dimana daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah. (Mahmudi, 2010).

Teori yang menjelaskan tentang hubungan yang tercipta antara pemerintah dan masyarakat yaitu Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai principal yang memberikan wewenang kepada agen untuk mengelola dana dan memberikan pelayanan publik yang layak bagi masyarakat.

Menurut (Siahaan, 2010) Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran- pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Selain itu, Retribusi daerah yang selanjutnya disebut sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Kebijakan desentralisasi fiskal memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sumber penerimaannya salah satunya yaitu penerimaan retribusi daerah yang selanjutnya akan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), salah satu daerah yang mendorong potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu Kabupaten Kampar.

Penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Kampar sendiri merupakan kontribusi dari berbagai jenis, diantaranya retribusi pasar, sebesar 13,45%, retribusi rumah sakit dan klinik berkontribusi sebesar 7,15%, selanjutnya retribusi terminal sebesar 3,36% dan retribusi mendirikan bangunan memiliki kontribusi sebesar 18,05%. Dari 4 sumber penerimaan retribusi daerah tersebut, retribusi izin mendirikan bangunan merupakan penyumbang terbesar.

Izin mendirikan bangunan (IMB) merupakan salah satu pelayanan perizinan yang diberikan pemerintah, dimana sebelum memulai mendirikan bangunan, pembuat bangunan terlebih dahulu harus memiliki surat izin mendirikan bangunan terkait dengan kelayakan, kenyamanan, keamanan sesuai dengan fungsinya. Tujuan diperlukan izin mendirikan bangunan adalah untuk menjaga ketertiban, kenyamanan dan keamanan dari bangunan itu sendiri terhadap penghuninya maupun lingkungan sekitar. Berikut ini dapat dilihat perkembangan realisasi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Kampar :

**Tabel 1. Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Kampar**

Tahun	Realisasi (Rp)
2010	1.825.450.350
2011	2.025.268.270
2012	2.104.263.320
2013	2.096.242.530
2014	2.115.302.150
2015	2.406.400.320
2016	2.653.240.250
2017	3.593.980.270
2018	9.621.454.420
2019	3.522.711.000

*Sumber:* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Kampar, 2020

Pada hakekatnya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang di definisikan sebagai izin yang digunakan untuk mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam suatu wilayah, dikeluarkan oleh dinas yang bersangkutan berupa rekomendasi dalam pemberian Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) ini tergantung dari keputusan izin lokasi yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP).

Agar di dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah atau hambatan perlu adanya sarana perangkat perizinan dan rencana tata ruang yang mantap. Rencana tata ruang yang mantap atau sudah operasional merupakan sarana pengendali perkembangan fisik di dalam pelaksanaan pembangunan, yang berarti bahwa rencana tersebut sudah diberikan landasan hukum pelaksanaannya berupa Peraturan Daerah atau yang disingkat dengan PERDA, dimana di Kabupaten Kampar sendiri untuk retribusi IMB diatur dalam peraturan Bupati Kampar Nomor 58 Tahun 2017 tentang retribusi perizinan tertentu.

Perkembangan penerimaan retribusi tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya yaitu bangunan yang didirikan, dimana semakin banyak atau

meningkatnya jumlah bangunan maka akan mendorong peningkatan permintaan izin mendirikan bangunan sehingga dengan demikian akan mendorong peningkatan penerimaan retribusi. Retribusi IMB merupakan iuran yang harus dibayarkan masyarakat atas perizinan yang di peroleh nya. Menurut Teori Keynes, konsumsi yang dilakukan oleh satu orang dalam perekonomian akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada perekonomian yang sama. Sehingga apabila seorang membelanjakan uangnya, ia membantu meningkatkan pendapatan orang lain. Siklus ini terus berlanjut dan membuat perekonomian dapat berjalan secara normal.

Para ahli ekonomi klasik yang di pelopori Adam smith bahkan menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan input yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan. Dengan semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula kebutuhan akan bangunan baik itu untuk tempat tinggal maupun untuk kegiatan usaha. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk maka akan mendorong kebutuhan akan bangunan salah satunya perumahan, jika dilihat dari fungsinya bagi pemilik bangunan, pengurusan IMB memberikan manfaat berupa kepastian hukum atas bangunan yang dimiliki. Sehingga semakin penting kepemilikan IMB atas sebuah bangunan.

IMB merupakan salah satu bentuk pengendalian tata ruang kota. Keberhasilan dari pengendalian tersebut sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat. Artinya apabila setiap masyarakat yang ingin membangun atau merehabilitasi bangunan rumahnya, maka dapat dikendalikan melalui peran serta masyarakat dalam mengurus IMB yang merupakan faktor yang sangat penting dalam pengendalian tata ruang kota. Sehingga semakin meningkatnya jumlah bangunan yang memperoleh izin dan mendirikan bangunan dan segalan hal terkait dengan ini, maka tentunya hal ini akan mendorong semakin meningkatnya penerimaan retribusi IMB. Sebagaimana dilihat pada perkembangan penerimaan retribusi IMB yang cenderung berfluktuatif tentunya hal ini di pengaruhi oleh jumlah bangunan yang mengurus perizinan IMB.

Namun, yang menjadi persoalan di Kabupaten Kampar saat ini adalah, masih rendahnya kesadaran masyarakat serta pengetahuan masyarakat terkait dengan perizinan IMB itu sendiri, sehingga masih banyak masyarakat yang belum memperoleh perizinan IMB. Untuk lebih jelas berikut ini dapat dilihat perkembangan jumlah bangunan yang mengurus IMB di Kabupaten Kampar:

**Tabel 2. Jumlah Bangunan Memiliki IMB di Kabupaten Kampar Tahun 2010 – 2019**

Tahun	Jumlah Bangunan (Unit)	Pertumbuhan (%)
2010	4.005	-
2011	4.250	6,12
2012	2.878	-32,28
2013	1.015	-64,73
2014	2.582	154,38
2015	3.719	44,04
2016	6.744	81,34
2017	11.023	63,45

2018	13.250	20,20
2019	7.419	-44,01

*Sumber:* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)  
Kabupaten Kampar, 2020.

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat perkembangan jumlah bangunan yang melakukan perizinan IMB di Kabupaten Kampar, dimana pada tahun 2010 – 2019 dapat dilihat jumlah bangunan berfluktuatif, selain itu pada tahun 2019 justru menunjukkan kondisi yang kurang membahagiakan dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah bangunan yang cukup besar yaitu dari 6.744 unit bangunan di tahun 2016 menjadi 11.023 unit bangunan di tahun 2017, dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan kembali menjadi 13.250 unit bangunan. Melihat kondisi demikian tentunya memunculkan pertanyaan terkait dengan perizinan IMB di Kabupaten Kampar.

Selanjutnya, jika di kaitan pertumbuhan ekonomi dan kebijakan desentralisasi negara, perlu kiranya dipaparkan mengenai teori desentralisasi generasi pertama (tradisional). Teori desentralisasi negara tradisional memberikan pandangan yang menunjukkan bagaimana desentralisasi negara bisa meningkatkan fungsi sektor negara, melalui potensi alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien di sektor negara. (Sumarsono & Utomo, 2009).

Berdasarkan Teori Tiebout yang menjadi landasan konsep desentralisasi negara, bahwa dengan adanya pelimpahan wewenang akan meningkatkan kemampuan daerah dalam melayani kebutuhan barang negara dengan lebih baik dan efisien. Kondisi peningkatan pelayanan barang negara ini dalam kaitannya hubungan antar daerah otonom akan memberikan kompetisi persaingan antar kabupaten/kota untuk memaksimalkan kepuasan masyarakat (Todaro & Smith, 2006).

Salah satu wujud dari desentralisasi negara adalah pemberian sumber - sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. PAD mencerminkan *local taxing power* yang “cukup” sebagai *necessary condition* bagi terwujudnya otonomi daerah yang luas karena nilai dan proporsinya yang cukup dominan untuk mendanai daerah. Salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yakni untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya sehingga pelayanan publik yang dilakukan dapat menjadi lebih efisien dan efektif (Kuncoro, 2004).

Pendapatan perkapita merupakan salah satu ukuran bagi kemakmuran suatu daerah, pendapatan perkapita yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi perkapita yang selanjutnya menimbulkan intensif bagi diubahnya struktur produksi pada saat pendapatan meningkat, permintaan akan barang-barang manufaktur dan jasa pasti akan meningkat lebih cepat dari pada permintaan akan produk-produk pertanian (Todaro & Smith, 2006)

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula permintaan barang dan jasa. Hal ini mengakibatkan semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pajak dan retribusi yang ditarik pemerintah daerah. Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

Teori Peacock dan Wiseman adalah perkembangan ekonomi menyebabkan pungutan daerah seperti pajak dan retribusi yang semakin meningkat dan meningkatnya penerimaan daerah dari pajak dan retribusi menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat (Kuncoro, 2004). Oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GDP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar.

Berikut ini dapat dilihat perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Kampar:

**Tabel 3. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kampar Tahun 2010 – 2019**

Tahun	PDRB (Milyar Rp)	Pertumbuhan (%)
2010	37.822,02	-
2011	46.392,70	22,66
2012	53.584,01	15,5
2013	61.515,51	14,8
2014	68.816,91	11,87
2015	66.285,16	-3,68
2016	69.676,25	5,12
2017	71.571,02	2,72
2018	77.186,85	7,85
2019	77.422,75	0,31

*Sumber:* Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat perkembangan produk regional bruto (PDRB) tahun 2010 – 2019 terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2010 PDRB Kabupaten Kampar sebesar Rp37.822,02 Milyaran terus mengalami peningkatan hingga tahun 2014 menjadi Rp68.816,91 dan pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi Rp66.285,16. Tetapi di tahun berikutnya 2016 PDRB Kabupaten Kampar kembali mengalami peningkatan menjadi Rp77.422,75 Milyaran.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :1) Apakah pengaruh jumlah bangunan dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Kampar? 2) Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kampar dalam peningkatan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Kampar?

Adapun tujuan penelitian ini nantinya adalah 1) Untuk menganalisis pengaruh jumlah bangunan dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Kampar. 2) Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kampar dalam peningkatan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Kampar.

## KAJIAN PUSTAKA

### Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber yang harus selalu dan terus menerus di pacu pertumbuhannya, karena PAD merupakan egarari penting untuk memenuhi tingkat kemandirian pemerintah di bidang keuangan. Semakin tinggi peranan PAD terhadap APBD maka semakin berhasil usaha pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No.33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 6 disebutkan bahwa sumber PAD terdiri dari :

1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan dan PAD yang sah

### **Retribusi Daerah**

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah/pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, karena jasa yang di berikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Menurut Suparmoko (2011) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Siahaan, 2010).

### **Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah**

Merupakan bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atau badan lain yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sedangkan perusahaan daerah ialah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang di pisahkan.

### **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

Menurut (Siahaan, 2010) Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran- pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Selain itu, Retribusi daerah yang selanjutnya disebut sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang di maksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut (Talidzhu, 2002), mengatakan bahwa pelayanan (*service*) itu meliputi jasa dan pelayanan jasa adalah komoditi, sedangkan layanan Pemerintah kepada masyarakat terkait dengan suatu hak dan terlepas dari persoalan apakah pemegang hak itu dapat dibebani suatu kewajiban atau tidak. Pelayanan egera adalah segala pelayanan yang diberikan pemerintah swasta kepada masyarakat dalam rangka meliputi kebutuhan. Didalam ilmu politik dan ilmu administrasi egera pengertian pelayanan negara hanya terbatas pada jenis pelayanan yang diberikan pemerintah saja kepada masyarakat.

## Hipotesis

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu serta kerangka penelitian, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian adalah jumlah bangunan dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Kampar.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kampar adapun hal yang mendukung pemilihan lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Kampar adalah daerah terluas di Provinsi Riau. Waktu penelitian ini adalah pada bulan September tahun 2020.

### Definisi Operasional Variabel

Ruang lingkup penelitian ini mencakup pengaruh Retribusi IMB, jumlah bangunan dan PDRB Kabupaten Kampar. Untuk lebih memudahkan pembahasan maka dapat dilihat definisi operasional variabel sebagai berikut:

**Tabel 4. Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi Operasional	Satuan
Retribusi IMB (Y)	Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. (Siahaan, 2010)	Rupiah
Jumlah bangunan (X1)	Jumlah bangunan adalah jumlah bangunan yang memiliki izin mendirikan bangunan	Unit
PDRB (X2)	PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Dan pada PDRB dalam penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga berlaku (BPS, 2020)	Rupiah

### Metode Analisis Data

Untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat metode analisis model regresi berganda dengan teknik analisis kuadrat terkecil sederhana (*Ordinary Least Square(OLS)*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis regresi berganda teknik analisis (*Ordinary Least Square(OLS)*) dengan bantuan aplikasi *Eviews 10*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

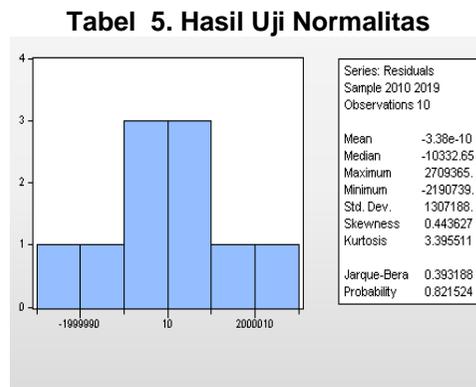
### HASIL

#### Uji Asumsi Klasik

Persamaan regresi linear berganda harus bersifat estimator linear tidak bias yang terbaik (*best linear unbiased estimation/BLUE*). Oleh karena itu, selanjutnya model regresi dalam penelitian ini dilakukan pengujian sebagai berikut:

#### 1. Uji Normalitas

Uji distribusi normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data yang kita uji memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk uji normalitas ini digunakan histogram normality test. Hasil uji normalitas yang menggunakan jarque-berra, dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Sumber : Data Olahan Eviews, 2020

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal, hal ini dapat dilihat dari nilai Jarque- Bera probability lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,821524.

#### 2. Uji Multikolinearitas

Variabel bebas maka regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolinear. Indikator multikolinearitas adalah VIF (*variance inflation factor*), jika nilai VIF tidak lebih besar dari 10 tidak kurang dari 0,10 maka model dinyatakan tidak terdapat gejala multikolier (Suliyanto, 2011). Hasil uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas**

Variable	Coefficient		Centered VIF
	Uncentered Variance	VIF	
JB	23154.78	4.864033	1.453555
PDRB	2030.729	38.17237	1.453555
C	6.29E+12	28.62724	NA

Sumber : Data Olahan Eviews, 2020

Berdasarkan Tabel 6 diatas diperoleh nilai VIF untuk seluruh variabel bebas jumlah bangunan 1.453555 dan PDRB sebesar 1,453555 adalah lebih kecil dari 10. Jadi dapat disimpulkan model regresi bebas dari gejala multikolinearitas.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji ARCH dilakukan dengan mengestimasi fungsi regresi terlebih dahulu dengan menspesifikasikan variabel bebas dan variabel terikat. Untuk menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas pada persamaan regresi. Hasil pengujian sebagian berikut:

**Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: ARCH			
F-statistic	1.228617	Prob. F(1,7)	0.3043
Obs*R-squared	1.343792	Prob. Chi-Square(1)	0.2464

Sumber : Data Olahan Eviews, 2020

Berdasarkan Tabel diatas apabila nilai Prob.F dan Prob. *Chi-square* < 5% maka terdapat heteroskedastisitas. Sedangkan nilai Prob.F (0,3043) > 0.05 dan nilai Prob. *Chi-square* (0,2464) > 0.05 maka dapat diartikan tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi.

### 4. Uji Autokorelasi

Dengan menggunakan uji Lagrange Multiplier (*LM-test*) untuk mendeteksi adanya masalah autokorelasi. Jika Prob.F dan Prob. *Chi-square* > dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi dalam model yang digunakan.

**Tabel 8. Uji Autokorelasi**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	1.376075	Prob. F(1,6)	0.2852
Obs*R-squared	1.865592	Prob. Chi-Square(1)	0.1720

Sumber : Data Olahan Eviews, 2020

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi karena nilai Prob.F adalah sebesar 0,2852 > 0,05 dan Prob. *Chi-square* adalah sebesar 0,1720 > 0,05.

## Uji Statistik

### 1. Uji Simultan (Uji F)

Dari tabel 5 diatas dapat di lihat tingkat probabilitas (F-Statistic) sebesar 0.016968. Hal ini berarti tingkat probabilitas (F-Statistic) sebesar 0.016968. lebih kecil dari nilai probabilitas ( $\text{sig} < 0,05$ ). Hal ini berarti bahwa jumlah bangunan dan PDRB berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penerimaan retribusi IMB di Kabupaten Kampar.

### 2. Uji Parsial (Uji t)

#### a. Variabel Jumlah Bangunan (X1)

Dari hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa jumlah bangunan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi IMB di Kabupaten Kampar. Hal ini dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi (Probabilitas) < 0,05 yaitu sebesar

0.0215. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan jumlah bangunan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi IMB di Kabupaten Kampar.

b. Variabel PDRB (X<sub>2</sub>)

Dari hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa PDRB Kampar tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi IMB di Kabupaten Kampar. Hal ini dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi (Probabilitas) > 0,05 yaitu sebesar 0.6276. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan PDRB Kampar berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi IMB di Kabupaten Kampar.

### 3. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Berdasarkan hasil koefisien determinasi pada Tabel 5 menunjukkan nilai Adjusted R-square sebesar 0.598835. Hal ini berarti 59,8835% variabel penerimaan retribusi IMB di Kabupaten Kampar dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya yaitu jumlah bangunan dan PDRB Kabupaten Kampar. Sedangkan 40,1165% dijelaskan oleh variabel lain diluar persamaan regresi.

### Analisis Hasil Regresi

Berdasarkan Tabel diatas didapatkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 795968.1 + 448.5908X_1 + 22.85661X_2$$

a. Koefisien Konstanta

Dari persamaan regresi di atas menunjukkan konstanta sebesar 795968.1. Hal ini berarti semua variabel independen (jumlah bangunan dan PDRB Kabupaten Kampar) diasumsikan bernilai nol atau tetap, maka dapat dikatakan bahwa Y (penerimaan retribusi IMB) sebesar Rp 795.968,1.

b. Koefisien Jumlah Bangunan (X<sub>1</sub>)

Dari persamaan regresi dapat diketahui variabel jumlah bangunan menunjukkan nilai koefisien sebesar 448.5908, jika jumlah bangunan meningkat sebesar 1.000 unit maka penerimaan retribusi IMB akan meningkat sebesar Rp448.590,8 dan variabel lain di anggap tetap.

c. Koefisien PDRB (X<sub>2</sub>)

Dari persamaan regresi dapat diketahui variabel PDRB Kampar menunjukkan nilai koefisien sebesar 22.85661 yang artinya jika PDRB meningkat sebesar Rp 1.000 jutaan maka penerimaan retribusi IMB akan meningkat sebesar Rp22.856,61 dan variabel lain di anggap tetap. Dan sebaliknya. Namun karena PDRB tidak berpengaruh secara parsial maka perubahan PDRB tidak dapat menjelaskan penerimaan retribusi IMB.

## PEMBAHASAN

### Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi IMB di Kabupaten Kampar

Penerimaan retribusi itu sendiri tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu dipengaruhi oleh banyaknya bangunan yang mengurus izin dan tentunya pendapatan yang terlihat dari PDRB Kabupaten Kampar. Sehingga pengaruh antara jumlah bangunan dan PDRB dapat diketahui dari penjabaran hasil analisis regresi dimana secara serempak di lihat tingkat probabilitas (F-Statistic) sebesar 0.016968. Hal ini berarti tingkat probabilitas (F-Statistic) sebesar 0.016968. lebih kecil dari nilai probabilitas (sig < 0,05), maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima. Hal ini berarti bahwa jumlah bangunan dan PDRB berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penerimaan retribusi IMB di Kabupaten Kampar.

Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu sebesar 59,8835% yang artinya variabel penerimaan retribusi IMB di Kabupaten Kampar dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya yaitu jumlah bangunan dan PDRB Kabupaten Kampar. Sedangkan 40,1165% dijelaskan oleh variabel lain diluar persamaan regresi. Selain itu, diperoleh nilai koefisien konstanta sebesar 795968.1. Hal ini berarti semua variabel independen (jumlah bangunan dan PDRB Kabupaten Kampar) diasumsikan bernilai nol atau tetap, maka dapat dikatakan bahwa Y (penerimaan retribusi IMB) sebesar Rp 795.968,1.

Sedangkan secara parsial, variabel jumlah bangunan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi IMB di Kabupaten Kampar. Hal ini dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi (Probabilitas) < 0,05 yaitu sebesar 0.0215. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan jumlah bangunan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi IMB di Kabupaten Kampar. Koefisien jumlah bangunan menunjukkan nilai koefisien sebesar 448.5908, jika jumlah bangunan meningkat sebesar 1.000 unit maka penerimaan retribusi IMB akan meningkat sebesar Rp448.590,8 dan variabel lain di anggap tetap. Berpengaruhnya jumlah bangunan terhadap penerimaan retribusi artinya pada saat jumlah bangunan memiliki izin meningkatkan maka akan meningkatkan penerimaan retribusi. Sehingga hal ini mendorong untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan bangunan yang dimilikinya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rosalina, 2015) tentang Analisis Pertumbuhan Dan Kontribusi Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Daerah, dimana jumlah rumah sakit dan puskesmas memberikan dukungan terhadap pos pungutan retribusi pelayanan kesehatan dan kontribusi pada penerimaan retribusi daerah. Selain itu, PDRB Kampar tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi IMB di Kabupaten Kampar. Hal ini dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi (Probabilitas) > 0,05 yaitu sebesar 0.6276. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan PDRB Kampar berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi IMB di Kabupaten Kampar.

Variabel PDRB Kampar menunjukkan nilai koefisien sebesar 22.85661 yang artinya jika PDRB meningkat sebesar Rp 1.000 jutaan maka penerimaan retribusi IMB akan meningkat sebesar Rp22.856,61 dan variabel lain di anggap tetap. Dan sebaliknya. Namun karena PDRB tidak berpengaruh secara parsial maka perubahan PDRB tidak dapat menjelaskan penerimaan retribusi IMB. Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu alat untuk mengetahui perkembangan dan struktur ekonomi suatu wilayah di yakini masih merupakan indikator dalam menentukan arah pembangunan yang digambarkan oleh perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa-jasa yang diproduksi didalam Negara tersebut dalam satu tahun tertentu. Barang-barang dan jasa-jasa ini diproduksi bukan saja oleh perusahaan milik penduduk Negara tersebut tetapi oleh penduduk Negara lain yang bertempat tinggal di Negara tersebut (Sukirno, 2003 ). Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Asmuruf, Rimate, & Kawung, 2015) dimana diperoleh hasil bahwa PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan daerah, retribusi merupakan salah satu jenis penerimaan daerah.

### **Kebijakan Pemerintah Dalam Peningkatan Penerimaan Retribusi IMB**

Perizinan memiliki fungsi keuangan (*budgetering*), yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara. Pemberian lisensi dan izin kepada masyarakat dilakukan dengan kontra prestasi berupa retribusi perizinan. Karena negara mendapatkan kedaulatan dari rakyat, maka retribusi perizinan hanya bisa dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Penarikan retribusi perizinan hanya dibenarkan jika ada dasar hukum, yaitu undang-undang/peraturan daerah.

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan dibidang retribusi tujuan akhirnya, yaitu untuk membiayai pembangunan. Sehingga kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Kampar adalah memberikan informasi berupa sosialisasi terait dengan pentingnya memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) atas kepemilikan bangunan oleh masyarakat terutama masyarakat di daerah yang jauh dari pusat perizinan IMB. Karena dalam pengurusan IMB sangat diburuhkan kesadaran dari masyarakat itu sendiri.

Selain itu, ada baiknya ditetapkan Kebijakan lain yang ditetapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Badan ini ialah menetapkan standarisasi waktu penyelesaian pelayanan, sehingga masyarakat akan dapat merencanakan waktu dalam pengurusan IMB. Untuk mewujudkan standarisasi waktu pelayanan tersebut, maka ditetapkan mekanisme alur pelayanan dengan empat dasar yaitu mudah, cepat, pasti, dan transparan. Terutama bentuk Pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu (*one stop service*) ini membuat waktu pembuatan izin menjadi lebih singkat. Pasalnya, dengan pengurusan administrasi berbasis teknologi informasi, input data cukup dilakukan sekali dan administrasi bisa dilakukan simultan. Dengan adanya kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu, seluruh perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dapat terlayani dalam satu lembaga.

Harapan yang ingin dicapai adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada kegiatan masyarakat terutama perizinan. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas layanan public. Oleh karena itu, diharapkan terwujudnya pelayan public yang cepat, murah, transparan, pasti, dan terjangkau, di samping untuk meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik. Sehingga dalam menerapkan suatu implementasi kebijakan sangat perlu memperhatikan aspek yang terpenting, sedangkan fase pelaksanaan kebijakan kurang mendapat perhatian atau dianggap sebagai tanggung jawab kelompok lain. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tergantung pada kemampuan instansi pelaksana. Jika implementasi kebijakan gagal maka yang disalahkan biasanya adalah pihak manajemen yang dianggap kurang memiliki komitmen sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih baik untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaksana (Akib, 2010).

Melihat kondisi yang terjadi pada tahun terakhir realisasi penerimaan retribusi IMB yang belum memenuhi target, sehingga perlunya model implementasi kebijakan dalam mewujudkan tujuan suatu program, adapun model yang bisa diterapkan yaitu model interaktif menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai proses dinamis, karena pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Hal itu dilakukan ketika kebijakan publik dianggap kurang memenuhi harapan para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Ini berarti bahwa berbagai tahap implementasi kebijakan publik akan dianalisis dan dievaluasi oleh setiap pihak

sehingga potensi, kekuatan dan kelemahan pada setiap fase pelaksanaannya dapat diketahui dan segera diperbaiki untuk mencapai tujuan (Akib, 2010).

Oleh karena itu, meskipun persyaratan input sumber daya merupakan keharusan dalam proses implementasi kebijakan, tetapi hal itu tidak menjamin suatu kebijakan akan dilaksanakan dengan baik. Input sumberdaya dapat digunakan secara optimum jika dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan terjadi interaksi positif dan dinamis antara pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan dan pengguna kebijakan (masyarakat) dalam suasana dan lingkungan yang kondusif. Pada kesempatan lain Korten dalam (Akib, 2010) menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang dipersyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Selain itu model yang lebih sederhana yaitu, model deskriptif manajemen implementasi kebijakan berbasis pengetahuan meliputi: "dimensi" (substansi isi, signifikansi atau urgensi, konteks, infrastruktur), "indikator" dan "kriteria pengukuran" dari berbagai model implementasi kebijakan sebagai sebuah sistem yang menekankan peranan dan fungsi aktor - pelaksana, pemangku kepentingan, dan kelompok target dalam memberdayakan kreasi pengetahuan yang dimiliki dalam melaksanakan kebijakan atau program. Gambaran rinci mengenai model ini akan dijelaskan dalam artikel yang lain.

## **SIMPULAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah

1. Jumlah bangunan dan PDRB Kabupaten Kampar berpengaruh secara serempak atau simultan terhadap penerimaan retribusi IMB di Kabupaten Kampar. Selain simultan, berikut ini dapat dilihat pengaruh secara parsial yaitu jumlah bangunan berpengaruh positif signifikan terhadap retribusi IMB di Kabupaten Kampar. Sedangkan PDRB tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan retribusi IMB di Kabupaten Kampar.
2. Implementasi kebijakan yang dilakukan di Kabupaten Kampar untuk meningkatkan penerimaan retribusi IMB adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinn IMB sehingga jumlah bangunan yang memiliki izin akan semakin meningkat, hal tersebut mengingat jumlah bangunan yang menentukan jumlah penerimaan retribusi IMB itu sendiri.

### **Saran**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah

1. Jumlah bangunan dan PDRB Kabupaten Kampar berpengaruh secara serempak atau simultan terhadap penerimaan retribusi IMB di Kabupaten Kampar. Selain simultan, berikut ini dapat dilihat pengaruh secara parsial yaitu jumlah bangunan berpengaruh positif signifikan terhadap retribusi IMB di

Kabupaten Kampar. Sedangkan PDRB tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan retribusi IMB di Kabupaten Kampar.

2. Implementasi kebijakan yang dilakukan di Kabupaten Kampar untuk meningkatkan penerimaan retribusi IMB adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinn IMB sehingga jumlah bangunan yang memiliki izin akan semakin meningkat, hal tersebut mengingat jumlah bangunan yang menentukan jumlah penerimaan retribusi IMB itu sendiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (20098). *Pengembangan Wilayah Konsep Dan Teori*. Jakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik* 1(1) , 1-11.
- Arsyad, L. (2002). *Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: Stie Ykpn.
- Dumairy. (2001). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi Dan Pembangunan Daerah*. Erlangga: Jakarta.
- Mankiw, N. G. (2007). *Makroekonomi, Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga.
- Munawir. (2009). *Analisis Laporan Keuangan*. . Yogyakarta: Liberty.
- Siahaan, M. (2010). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan* . Jakarta: Lpef-Ui Bima Grafika.
- Sumarsono, H., & Utomo, S. H. (2009). Deliberate Inflation Pada Kebijakan Desentralisasi Fiskal Jawa Timur Dan Dampaknya Bagi Pertumbuhan Daerah. *Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan* 1 (3) , 157-168.
- Sutedi, A. (2015). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Cetakan Ke-3*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Talidzhu, N. (2002). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tarigan, R. (2015). *Ekonomi Regional Teori Dan Aplikasi Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi (Edisi Kesembilan, Jilid I)*. Jakarta: Erlangga.